



# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 96.1 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan; maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviw Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
14. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota tidore Kepulauan
15. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Walikota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 28 September 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



*Ali Ibrahim*

ALI IBRAHIM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
 NOMOR : 96.1 Tahun 2018  
 TANGGAL : 28 September 2018  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA TIDORE KEPULAUAN  
 TAHUN 2016-2021 HASIL REVIEW**

**Misi 1 : Memperkuat dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berkeadilan Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi / Cara Pengukuran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur laut maupun darat yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup	1. Meningkatkan infrastruktur darat dan laut yang mendukung perekonomian daerah	Persentase jalan kondisi baik	%	Jumlah Panjang Jalan dalam Kondisi Baik/Jumlah Panjang Jalan di Kota Tidore Kepulauan x 100%	
			Persentase kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	Jumlah Panjang Irigasi dalam Kondisi Baik/Jumlah Panjang Irigasi di Kota Tidore Kepulauan x 100%	
			Pasar yang dibangun/ dikelola/ tingkatkan sarana dan prasarananya	Unit	Jumlah Pasar yang dibangun dan ditingkatkan sarana dan prasarananya pada tahun tersebut	
			Pelabuhan yang dikelola dan dikembangkan	Lokasi	Jumlah Terminal/Pelabuhan yang dikelola dan dikembangkan pada tahun tersebut	
			Kesesuaian rencana dan pemanfaatan ruang	%	Luas pemanfaatan ruang dibagi luas rencana tata ruang dikali 100%	
		2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Ruang Terbuka Hijau yang dikelola dengan baik	Ha	Luas RTH yang dikelola	
			Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Kategori	Hasil perhitungan variabel	

## Misi 2 : Pengembangan Kelautan dan Perikanan Serta Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Wilayah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi / Cara Pengukuran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Produktivitas wilayah dan akses pemasaran produk kelautan/ perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah yang semakin berkembang	1. Meningkatkan hasil produksi perikanan dan pertanian yang berbasis unggulan wilayah	Produksi perikanan daerah	Ton	Jumlah Produksi Perikanan Tahun bersangkutan	
			Produksi olahan hasil perikanan	Ton	Jumlah Hasil Olahan Perikanan Tahun bersangkutan	
			Produksi pertanian dan perkebunan	Ton	Jumlah Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan Tahun bersangkutan	

## Misi 3 : Penguatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mempertimbangkan Geostrategi, Geopolitik dan Potensi Sumber Daya Wilayah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi / Cara Pengukuran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan investasi yang seiring dengan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi berbasis pada potensi lokal	Pertumbuhan PDRB	%	$\text{Laju Pertumbuhan PDB} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ $\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$	
			Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	Berdasarkan Hasil perhitungan BPS	
			PDRB per kapita	Rp. Juta	Rata-rata pendapatan masyarakat di daerah	
			Inflasi daerah	%	$IHK_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni} - P_{(n-1)i}}{P_{(n-1)i}} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^k P_{oi} Q_{oi}}$	
			Indeks Gini	%	$G = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\sigma}{\bar{y}} \rho(y, r_y)$	
			Nilai investasi di daerah	Rp	Nilai Investasi di Kota Tidore Kepulauan Tahun bersangkutan	

#### Misi 4 : Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Potensi Unggulan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi / Cara Pengukuran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sumber daya manusia yang semakin handal dan dapat bersaing baik secara lokal, nasional maupun internasional	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek pembangunan yang berbasis IPTEK	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	Berdasarkan hasil perhitungan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak	
		2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata dengan mempertimbangkan potensi keunggulan lokal	Akreditasi minimal B untuk SD	%	Jumlah SD yang Terakreditasi / Jumlah Seluruh SD x 100%	
			Akreditasi minimal B untuk SMP	%	Jumlah SMP yang Terakreditasi / Jumlah Seluruh SMP x 100%	
		3. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata	Puskesmas yang Tersertifikasi Akreditasi	Unit	Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi Setiap Tahun	
Rumah Sakit Daerah Kelas C yang Terakreditasi	Akreditasi		Hasil Akreditasi Rumah Sakit			

#### Misi 5 : Penguatan Pembangunan Sosial dan Budaya Serta Nilai-nilai Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Untuk Mendorong Akselerasi Pembangunan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi / Cara Pengukuran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Masyarakat Tidore yang semakin sejahtera dengan Tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah	1. Meningkatkan percepatan pembangunan dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya dan kearifan local sebagai modal sosial pembangunan	Indeks partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kategori	Perhitungan berdasarkan tiga kategori, yaitu Partisipasi sebagai kontribusi; Partisipasi sebagai organisasi; dan Partisipasi sebagai pemberdayaan	
		2. Meningkatkan pariwisata daerah dengan memanfaatkan potensi alam, sosial dan budaya.	Obyek pariwisata yang dikembangkan dan dikelola dengan baik	Lokasi	Jumlah Obyek pariwisata yang dikembangkan dan dikelola dengan baik setiap tahun	

## Misi 6 : Reformasi Birokrasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi / Cara Pengukuran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan <i>Good Governance</i>	1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Nilai Rata-rata IKM OPD	
			Tingkat kepatuhan dalam pelayanan publik	Nilai	Hasil Penilaian Ombudsman RI	
		2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	Hasil Evaluasi LKPD oleh BPK	
			Nilai LPPD	Nilai	Hasil Evaluasi LPPD	
			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Hasil PMPRB	
		3. Meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Presentase Tindaklanjut Selesai	%	Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti / Jumlah seluruh temuan yang Ada x 100%	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	Hasil Evaluasi SAKIP	
		Indeks Profesional ASN	Nilai	<i>Kompetensi Gap+ Kinerja+ kompensasi +(D-pD)</i>		

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 28 September 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM